

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press.
- Dirjosisworo, S. (1997). *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Mandar Maju.
- Erwina, L. (2012). *Ilmu Hukum*. Pustaka Bangsa.
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie. (2013). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika.
- Hartono, S. R. (1985). *Bentuk Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*.
- HS, S. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika.
- HS, S. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu "Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta."* PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Universitas Islam Indonesia, 01(03)*.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi. Cet. II*. citra aditya bakti.
- Kurniawan. (2014). *Hukum perusahaan*. Genta Publishing.
- Manan, B. (1998). *Pertumbuhan dan perkembangan kulturasi suatu negara*. Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2008). *pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada MediaGrup.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum*. liberty.
- Muhammad, A. (1999). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perusahaan Indonesia*. citra aditya bakti.
- Mulyadi, L. (1999). *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan.
- Naja, D. (2012). *Teknik Pembuatan Akta*. Pustaka yustisia.

- Notodisoerdjo, S. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Raja Grafindo Persada.
- Pati, A. M. dan S. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Press.
- Pramono, N. (2006). *Kedudukan Kekayaan Negara Dipisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang BUMN*. Tanpa Penerbit.
- Purwosutjipto, H. M. . (2003). *Pengertian Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.
- Rido, R. A. (1986). *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. remaja karya cv.
- Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Hukum*, 16(3).
- Senja, Z. F. dan R. A. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Difa Populisher.
- Setiawan, R. (1982). *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Alumni.
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. UII Press.
- Sunggono, B. (1997). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tobing, L. (1980). *Peraturan Jabatan Notaris*. erlangga.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Wilamarta, M. (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkass.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*).
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Jotaris

C. Sumber Lain

- Burhanuddin, S. F. (2021). *Analysis of Notary Deed as a Basic Reference to*

Evidence in Civil Law.

- Fauzan, M. I., Ikhwansyah, I., & Lubis, N. A. (2020). Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3, 305–320.
- Hasan, D. (2009). Naskah Akademik RUU tentang Badan Usaha Di Luar PT dan Koperasi. *Bhpn*, 2009.
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fuduciary Duty. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Juwana, H. (1999). Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Universitas Islam Indonesia*, 01(03).
- Ramantini, P. M. M. (2014). Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Oleh Para Pihak. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 6(9).
- Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Hukum*, 16(3).
- Setiawan, I. K. I., & Sjafii, R. I. R. (2019). Keabsahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perpanjangan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Yang Melewati Batas Hari. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3).
- Wardhani, L. C. (2017). Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *Jurnal Lex Renaissance*, 2(1).